

# ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGELOLAAN BERKELANJUTAN SUMBERDAYA GENETIK SAPI POTONG LOKAL DALAM SISTEM PERBIBITAN TERNAK NASIONAL

WARTOMO HARDJOSUBROTO

*Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*

## ABSTRAK

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan populasi sapi potong di Indonesia. Salah satu program yang sudah berjalan cukup lama adalah program persilangan dengan menggunakan metode inseminasi buatan menggunakan mani beku yang dikenal dengan program IB. Tidak kurang dari 10 bangsa sapi potong impor telah diintroduksi. Namun persilangan tersebut kurang diimbangi dengan program pemuliaan yang terarah, sehingga apabila tidak dibenahi justru dapat berdampak negatif terhadap perbaikan mutu bibit. Bahkan dengan *euphoria* desentralisasi, beberapa daerah mendirikan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Daerah yang apabila tidak dilakukan program pemuliaan secara terarah, dapat menyebabkan penurunan produktivitas ternak diantaranya meningkatnya derajat *in breeding*. Beberapa alternatif untuk pengelolaan berkelanjutan sumberdaya genetik sapi potong lokal (seperti sapi Bali, Madura, Peranakan Ongole, Sumba Ongole) adalah: (1) Perluasan padang pangan melalui konsep integrasi tanaman-ternak dan "transmigrasi ternak"; (2) Perubahan peraturan perundangan tentang kewenangan pemerintah pusat terkait dengan pengaturan mutu genetik ternak, pelestarian kawasan sapi lokal, dan kewenangan Komisi Nasional Plasma Nutfah; (3) Revitalisasi peran Balai Pembibitan Ternak Unggul menghidupkan kembali "ladang ternak"; dan (4) Perlunya penelitian dampak persilangan terhadap produktivitas dan sumbangan ekonominya.

**Kata kunci:** Sapi potong, sistem perbibitan, alternatif kebijakan

## ABSTRACT

### ALTERNATIVE POLICY IN MANAGING SUSTAINABLE GENETIC RESOURCES OF LOCAL BEEF CATTLE FOR NATIONAL LIVESTOCK BREEDING SYSTEM

Various efforts have been done by the government to enhance the productivity and population of beef cattle in Indonesia. One of the programs that have been carried out for a long time is crossbreeding using artificial insemination method with frozen semen known as AI program. Not less than 10 breeds of imported beef cattle have been introduced. However, the cross breeding is not followed by a clear breeding program, thus if it is not straightened out it will have negative impacts on the quality of the breed. In fact, due to the decentralization euphoria several regions established their own Artificial Insemination station (AIS). Providing there is no clear breeding program carried out, there will be a decrease in the livestock productivity, such as the increase of inbreeding. Several alternatives in managing sustainable genetic resources of local beef cattle (for examples, Bali cattle, Madura cattle, Ongole cross breed, and Sumba Ongole) are: (1) The broadening of grass field through the integrated concept of plant and livestock and livestock "transmigration"; (2) the alteration of regulations regarding the authority of the central government related to the quality of livestock genetic, the conservation of local cattle areas, and the authority of the National Germ plasm Commission; (3) Revitalization of the role of seed stock Institutes, reviving ranching; and (4) The importance of cross breeding impacts on productivity and its economic contribution.

**Key words:** Beef cattle, breeding system, alternative of policy

## PENDAHULUAN

Ditinjau dari topiknya, ada dua pokok bahasan yang perlu ditinjau untuk menentukan alternatif kebijakan, yaitu (1) sapi lokal; dan (2) bagaimana kebijakan pengembangannya sekarang.

Adapun keluaran yang diharapkan disamping alternatif kebijakannya sebagai keluaran utamanya, adalah: (1) Prospek agribisnis sapi potong; (2) Kebijakan pemerintah; dan (3) Informasi penelitian.

## Kilas balik sapi potong di Indonesia

Sapi Bali merupakan hasil domestikasi Banteng, yang telah berlangsung bertahun-tahun. Dahulu di Pulau Jawa dikenal sapi Jawa, yang mungkin merupakan keturunan sapi India yang dibawa oleh para pedagang zaman dahulu. Di Pulau Madura dikenal sapi Madura yang tidak diketahui asal-usulnya, namun ada dugaan merupakan hasil persilangan antara sapi Bali dengan sapi India (ada yang menduga dengan sapi Sinhala).

**Tabel 1.** Perkiraan jumlah sapi potong di Indonesia, pada tahun 2001

Item	SO	PO	Bali	Madura	Lainnya	Total
Jumlah (000 ekor)	294	874	2.977	1.279	5.767	11.191
Persen	2,63	7,81	26,6	11,43	51,53	100,00

**Sumber:** INDONESIA INTERNATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT FOUNDATION (leaflet)

**Tabel 2.** Perkiraan persentase bangsa sapi menurut pulau, pada tahun 2001 (%)

Pulau	SO	PO	Bali	Madura	Lainnya
Sumatera	12,97	6,42	6,68	6,12	26,58
Jawa	54,97	74,58	2,17	81,52	54,27
Kalimantan	13,30	0,85	44,70	2,06	2,89
Sulawesi	9,99	4,02	5,26	5,48	1,36
Bali dan Nusa Tenggara	9,17	14,13	40,78	4,81	13,17
Maluku dan Papua	-	-	0,46	-	1,72

**Sumber:** INDONESIA INTERNATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT FOUNDATION (leaflet)

Pada tahun 1812, Pemerintah Daerah Jawa Timur telah memasukkan sapi Zebu dari India, yang kemudian pada tahun 1897 importasi tersebut dilarang karena kekhawatiran terhadap penyakit *rinderpest*. Namun pada tahun 1905, pemasukan sapi Ongole dari India dimulai lagi, yang kemudian ditempatkan (dikarantina) di Pulau Sumba. Sapi Ongole ternyata dapat berkembang dengan baik di pulau tersebut sehingga Pulau Sumba dapat menjadi sumber bibit sapi Ongole, yang kemudian disebut sebagai sapi Sumba Ongole (SO).

Pada tahun 1915–1929 sapi SO mulai disebarakan ke Pulau Jawa. Penyebaran di Pulau Jawa dilakukan melalui program "Ongolisasi" yang dilengkapi dengan pola penyebarannya, yakni melalui program "Kontrak Sumba". Dampak dari program tersebut adalah sapi Jawa telah musnah dan terciptalah sapi Peranakan Ongole (PO) sebagai akibat terjadinya persilangan antara sapi SO dengan sapi Jawa. Dengan demikian, sejak saat itu terciptalah sapi-sapi lokal yang terdiri atas (1) sapi Bali; (2) sapi Madura; (3) sapi Sumba Ongole; dan (4) sapi Peranakan Ongole. Dari keempat sapi tersebut, sapi Bali dan sapi Madura dapat dikatakan merupakan sapi asli Indonesia.

## BEBERAPA USAHA PEMERINTAH DI BIDANG PEMULIAAN

### Era awal kemerdekaan

Pada era awal kemerdekaan, satu-satunya usaha pemuliaan di bidang ternak besar adalah program yang disebut dengan "Kebijakan Kemakmuran Rakyat" oleh Menteri Kasimo. Dengan program tersebut, dibentuklah Induk Taman Ternak (ITT) Baturraden dan *Milk Center* (MC) Boyolali.

### Era awal Orde Baru

Pada awal pemerintahan Orde Baru, kebijakan Direktorat Jenderal Peternakan yang paling menonjol, adalah: (1) "Transmigrasi" atau relokasi ternak; dan (2) Pewilayahan ternak.

Kegiatan "transmigrasi ternak" berupa penyebaran sapi ke pulau-pulau di luar pulau sumber ternak, antara lain memasukkan secara besar-besaran sapi Bali ke Sulawesi Selatan. Pewilayahan ternak adalah pembagian wilayah penyebaran ternak, yaitu Indonesia bagian Timur untuk sapi Bali dan bagian Barat untuk sapi putih (seperti sapi PO dan SO). Yang perlu dicatat dalam pewilayahan ternak adalah ditetapkannya "wilayah sumber bibit" sebagai wilayah pemurnian ternak, antara lain Pulau Bali sebagai sumber genetik sapi Bali, Pulau Madura untuk sapi Madura dan Pulau Sumba untuk sapi Sumba Ongole.

Kebijakan pengembangan ternak yang patut dicatat adalah dikeluarkannya beberapa program kebijakan pengembangan, antara lain PUTP (Panca Usaha Ternak Potong), PUSP (Panca Usaha Sapi Perah), dan dikenalkannya sistem pola kemitraan melalui program Inti - Plasma Ternak. Program Inseminasi Buatan untuk menunjang peningkatan mutu genetik sapi perah dan potong juga mulai digalakkan.

### Era pertengahan/akhir Orde Baru

Dalam rangka mempertahankan politik Orde Baru, mulailah kepentingan "politik" dimasukkan dalam usaha pengembangan ternak. Hal ini terlihat dari program-program yang dikenal sebagai program BANKOP dan BANPRES. Kecuali itu adalah program dimasukkannya berbagai macam bangsa ternak, baik

yang berupa ternak hidup maupun mani beku. Tidak kurang ada 10 macam bangsa sapi potong (antara lain, bangsa sapi Brahman, Brahman cross, Santa Gertrudis, Draught Master, Hereford, Black Angus, Shorthorn, Limousin, Simmental dan Charolais) telah dimasukkan ke Indonesia untuk disilangkan dengan ternak lokal. Semua kebijakan tersebut di atas lebih ke arah kelanggengan politik daripada peningkatan mutu genetik. Sama sekali tidak ada program yang terarah dalam melakukan persilangan pada sapi potong.

### Era reformasi

Kondisi sapi potong di awal era Reformasi, dapat dikatakan sebagai berikut:

1. Sapi Bali dilaporkan telah mengalami degradasi;
2. Sapi Madura juga dilaporkan telah mengalami degradasi;
3. Sapi PO, sebagian besar telah disilangkan dengan berbagai macam bangsa sapi; dan
4. Sapi SO dilaporkan telah mengalami degradasi dan wacana disilangkan telah timbul.

Dengan adanya Undang-undang Otonomi Daerah, maka keinginan ataupun tuntutan suatu daerah sulit dibendung ataupun dikendalikan oleh pemerintah pusat. Contoh hal tersebut di atas adalah keinginan daerah-daerah untuk menyilangkan ternaknya, hanya dikarenakan melihat performans hasil silangan yang "sekilas" baik, tanpa melihat dampak yang mungkin timbul di kelak kemudian hari. Akibat dari kebijakan ini adalah telah diperkenalkannya persilangan di Pulau Bali dan Madura, dua pulau yang dahulu dinyatakan sebagai "sumber genetik" sapi Bali dan Madura. Dampak lain adalah munculnya Balai Inseminasi Buatan (BIB) Daerah di banyak kabupaten, tanpa memperhitungkan kemungkinan dilakukannya rotasi ataupun peremajaan pejantan yang digunakan sebagai sumber mani beku (akibat dari tidak adanya rotasi ataupun penggantian pejantan adalah terjadinya proses *inbreeding*).

### BEBERAPA ALTERNATIF PENGEMBANGAN SAPI POTONG LOKAL

Beberapa usulan alternatif pengembangan sapi potong lokal, diantaranya:

#### Perluasan kawasan pangonan

Perluasan kawasan pangonan sapi potong, bukan dimaksudkan perluasan padang aritan untuk *cut and carry* pakan ternak, melainkan upaya memanfaatkan

rumput dari sumber lain seperti rumput dari perkebunan kelapa atau kelapa sawit. Pertanyaan yang timbul adalah: (a). Mungkinkah peternak dapat memanfaatkan rumput yang berada di bawah pohon kelapa ataupun pohon kelapa sawit?; dan (b). Apakah ada interaksi yang saling menguntungkan antara sapi potong yang memberi kotoran sebagai pupuk organik dengan hasil perkebunan kelapa maupun kelapa sawit? DIWYANTO (2004) menyatakan bahwa ternak mampu meningkatkan efisiensi dalam tenaga dan perawatan kebun sawit, perbaikan kesuburan dan mengatasi gulma.

### Transmigrasi ternak (dalam rangka menciptakan Pulau Sumba II)

Indonesia mempunyai ribuan pulau-pulau. Adakah kemungkinan menciptakan pulau "Sumba II" dengan melakukan transmigrasi sapi potong lokal ke sebuah pulau dan menjadikannya sebagai sumber sapi potong seperti halnya dahulu zaman Hindia Belanda menjadikan Pulau Sumba sebagai wilayah sumber sapi potong? Patut dikaji kemungkinan menjadikan pulau Kimaam di Papua dan Buru di Maluku untuk menjadi Sumba II.

### BEBERAPA SARAN UNTUK Mendukung PENGEMBANGAN SAPI POTONG LOKAL

#### Kebijakan pemerintah

Beberapa saran kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan sapi potong lokal, antara lain:

- a. Amandemen terhadap undang-undang yang mengatur kewenangan pusat.

Menurut DIREKTORAT PERBIBITAN DITJEN BP PETERNAKAN (2003), pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pusat tercantum dalam Pasal 3 ayat (3), yang berisi sebagai berikut:

- (a). Pengaturan pemasukan atau pengeluaran benih/bibit dan penetapan pedoman untuk penentuan standar pembibitan/pembenihan pertanian;
- (b). Pengaturan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya, obat hewan, vaksin, serta antigen, semen beku dan embrio ternak;
- (c). Penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas komoditas pertanian.

Pada Peraturan Pemerintah di atas, disarankan dilakukan perubahan peraturan yakni kendali perbaikan mutu genetik di tangan pusat, walaupun penyebarannya dilakukan oleh daerah.

- b. Pelestarian kawasan sumber genetik sapi potong lokal.
  - (a). Keberadaan kawasan pelestarian sumber genetik sapi potong lokal terutama sapi Bali dan Madura yang merupakan sapi asli Indonesia, perlu dipertahankan;
  - (b). Wacana untuk melakukan persilangan sapi lokal di Pulau Bali dan Madura perlu didiskusikan secara mendalam antara Pemda setempat, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi. Komisi Plasma Nutfah Nasional dan Komisi Bibit Ternak Dit. Perbibitan perlu didengar pendapatnya;
  - (c). Persilangan yang telah dilakukan di Pulau Jawa dan Sumba yang melibatkan sapi PO dan SO, perlu diteliti secara mendalam dampak terhadap produktivitasnya. Dalam melakukan persilangan, hendaknya dipertimbangkan pula segi sosial dan budaya masyarakat setempat. Apabila dampak persilangan ternyata bersifat positif, maka persilangan di kedua pulau tersebut dapat dilanjutkan; dan
  - (d). Mengingat pentingnya kelestarian keanekaragaman plasma nutfah sapi potong lokal sebagai bahan baku pemuliaan ternak untuk membentuk bibit unggul sesuai kondisi agro-ekosistem; kewenangan Komisi Nasional Plasma Nutfah perlu dipertegas, agar sarannya didengar dan dipatuhi oleh instansi terkait.
- c. Perubahan struktur dan reorientasi Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan.

Perubahan struktur yang dimaksud adalah struktur organisasi dari Direktorat Perbibitan ke bawah. Sebelum reformasi, garis komando atau hubungan antara Ditjen Bina Produksi Peternakan ke bawah, adalah sebagai berikut:



Dengan garis komando seperti tersebut di atas, maka kontrol mutu genetik dapat dilakukan dari atas

sampai ke pelaksana di bawah. Namun dengan adanya otonomi daerah, telah timbul banyak BIB-Daerah, yang tidak lagi berada langsung di bawah BIB. Dengan kondisi semacam ini, kalau koordinasi antara Direktorat Perbibitan dengan BIB-D kurang baik, dapat menimbulkan kesulitan dalam peningkatan mutu genetik ternak.

Reorientasi Ditjen Bina Produksi Peternakan dimaksudkan agar visi, misi maupun rencana strategisnya diharapkan lebih mengarah ke ekonomi makro/global dan tidak hanya pada masalah teknis belaka. Sebagai contoh misi dari BIB yang semula hanya bertugas dalam pengadaan semen beku ternak yang berkualitas, perlu disempurnakan menjadi ikut meningkatkan kesejahteraan peternak melalui pengadaan semen beku yang berkualitas. Dari misi tersebut di atas, tugas BIB sebetulnya tidak berubah, namun secara politis sudah "keluar" dari ranah peternakan dan menjangkau lingkup yang lebih luas.

### Prospek agribisnis sapi potong

Menurut DIREKTORAT PERBIBITAN (2003), kebutuhan sapi potong masih sekitar 1,8–2,0 juta ekor setiap tahun. Hal ini menandakan bahwa prospek agribisnis sapi potong masih menjanjikan. Saran yang terkait dalam bidang pengembangan sapi potong, yakni perlu dikembangkan pusat pembibitan sapi potong. Beberapa Dinas Peternakan mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbibitan. UPT Perbibitan yang khusus menangani sapi potong, yaitu UPT Padangmangatas. Dalam kaitannya dengan pengembangan sapi potong disarankan UPT Padangmangatas juga ikut mengembangkan sapi lokal. Kecuali itu, alangkah baiknya kalau PT Bina Mulya Ternak dapat "dihidupkan" kembali, atau setidaknya membentuk suatu UPT yang khusus bertugas mengembangkan sapi potong lokal.

### INFORMASI PENELITIAN

Ada tiga topik penelitian payung yang dapat diajukan berkenaan dengan pengembangan sapi potong lokal, yaitu:

1. Penelitian mengenai dampak penggembalaan sapi potong di bawah pohon kelapa atau kelapa sawit (alternatif yang diusulkan: perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan perkebunan kelapa di Sulawesi).
2. Survei potensi (*feasibility study*) suatu pulau atau wilayah untuk menjajagi kemungkinan disebarkannya sapi potong lokal di tempat tersebut, untuk menjadikannya sebagai wilayah penghasil bibit sapi lokal sebagaimana halnya pulau Sumba

(alternatif yang diusulkan: Pulau Kimaam di Papua dan Pulau Buru di Maluku).

3. Penelitian mengenai dampak persilangan sapi lokal, ditinjau dari segi produktivitas, ekonomi dan sosial budaya. Lokasi yang diusulkan; Jawa Timur (persilangan sudah dinyatakan berhasil), Madura (dampaknya terhadap budaya "karapan"), Bali (dampak terhadap sumber genetik) dan Sumba (persilangan sudah berjalan dengan baik).

### KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disampaikan kesimpulan antara lain:

1. Salah satu alternatif pengembangan sapi potong lokal dapat dilaksanakan melalui perluasan padang pangan yakni dengan "transmigrasi ternak" (menciptakan "Sumba II") dan integrasi perkebunan (kelapa sawit dan kelapa)-ternak (*crop livestock system*).
2. Beberapa kebijakan pemerintah yang diperlukan terkait dengan pengelolaan berkelanjutan sumberdaya genetik sapi potong lokal antara lain: (1) perubahan peraturan perundangan yang mengatur kewenangan pusat, yakni dengan memperluas kewenangan pusat untuk mengatur mutu genetik; (2) pelestarian kawasan ternak (sapi Bali dan Madura) dan perubahan kewenangan Komisi Nasional Plasma Nutfah; serta (3) perubahan struktur dan orientasi Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan terutama perluasan pembinaan BIB Daerah dan perluasan orientasi sampai ke masalah ekonomi makro/global.

3. Untuk pengembangan agribisnis sapi potong lokal perlu dikembangkan UPT pembibitan dan menghidupkan kembali "PT Bina Mulya Ternak" khusus sapi potong lokal.

4. Dalam penelitian, perlu pengembangan model integrasi tanaman-ternak terutama pada tanaman kelapa sawit dan kelapa; studi kelayakan penyebaran sapi ke suatu pulau; dan penelitian dampak persilangan terhadap produktivitas dan sumberdaya ekonomi serta dampak sosial-budayanya.

### DAFTAR BACAAN

- ANONIMOUS. 2004. Pembangunan *breeding center* dalam rangka pengembangan potensi sapi potong sebagai penunjang pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Merauke, Papua. Fakultas Peternakan, UGM. Yogyakarta.
- DIREKTORAT PERBIBITAN, DITJEN BP PETERNAKAN. 2003. Kebijakan peranan MOET untuk percepatan industri peternakan. Seminar Peranan MOET. Bogor.
- DIWYANTO, K. 2004. Sarjana Peternakan: Dalam Kancah Perkembangan Industri Peternakan. Ceramah, Fakultas Peternakan, UGM. Yogyakarta.
- HARDJOSUBROTO, W. 1994. *Aplikasi Pemuliabiakan Ternak di Lapangan*. Grasindo, Jakarta.
- INDONESIA INTERNASIONAL ANIMAL SCIENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT FOUNDATION. 2003. Statistik Sapi Potong di Indonesia.